



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021**

**PANGKALPINANG
TAHUN 2020**



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**RENCANA KERJA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2021**



PANGKALPINANG

TAHUN 2020



kukm.babelprov.go.id
-kukm@babelprov.go.id-

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, sistem perencanaan pembangunan nasional tertuang dalam satu sistem perencanaan pembangunan nasional yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Disamping itu dalam peraturan tersebut juga mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penjabaran RPJMD dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang akan dijadikan pedoman Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah selama satu tahun anggaran.

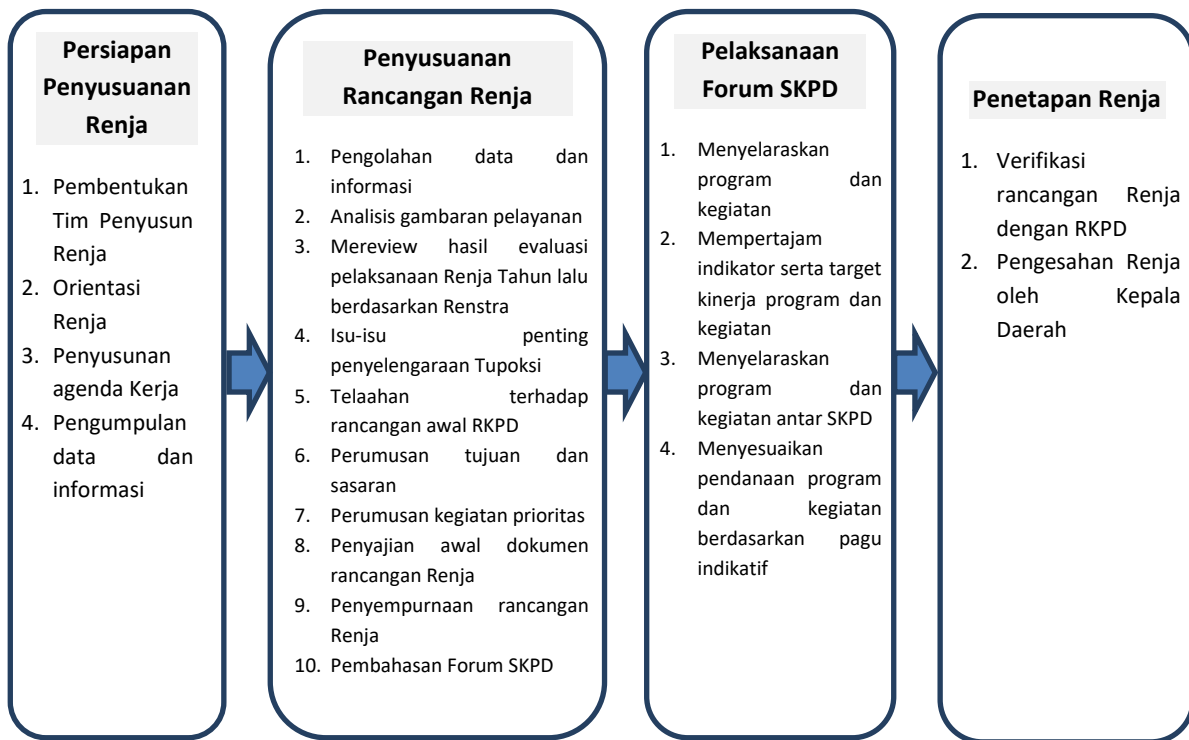
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada pasal 27 ayat 1 mengamanatkan bahwa SKPD menyusun Renja-SKPD yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan untuk satu tahun anggaran yang disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya serta prediksi masalah yang akan dihadapi. Selain itu Renja ini juga memuat kebijakan, program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran dalam pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi bahan utama RKPD serta Prakiraan maju anggaran yang dibutuhkan. Seluruh kebijakan tersebut dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan daya saing produk unggulan daerah dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dimulai dengan tahap persiapan yang meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Kemudian proses selanjutnya adalah

penyusunan rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan melalui dua tahap yaitu perumusan rancangan Renja dan penyajian rancangan Renja, setelah kedua tahapan tersebut dilaksanakan forum SKPD sebagai sarana untuk memfasilitasi penyampaian usulan baik dari Dinas yang membidangi pembinaan koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota maupun pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan rancangan kebijakan yang akan diakomodir ke dalam Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Setelah keseluruhan proses tersebut dilaksanakan, Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara kolektif dilakukan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan. Berikut ini disajikan bagan tahapan penyusunan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021.

Gambar 1.1.
Tahapan Penyusunan Renja



1.2. Landasan Hukum

Dasar dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai landasan hukum yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 disusun dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bagian dari perencanaan strategis yang merupakan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis;

2. Sebagai dokumen dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4. Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 disusun mengacu pada sistematika yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini memuat/menjelaskan latar belakang, landasan Hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat komplikasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun n-1 sampai dengan triwulan II Tahun 2019.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan tentang kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

BAB IV Penutup

Bab ini memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja merupakan salah satu acuan dalam menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kebijakan/Program/Kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun anggaran 2019, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 6 (enam) program dengan 19 (sembilan belas) kegiatan. Anggaran Belanja Langsung tahun 2019 sebesar Rp 17.290.282.500,- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp17.290.282.500 (tidak mengalami perubahan). Realisasi serapan anggaran belanja langsung sebesar Rp16.068.262.500,- atau 92,93% dengan sisa anggaran sebesar Rp1,222,020,000,- atau 7.07%. Alokasi belanja tidak langsung pada APBD induk sebesar Rp7.817.414.484,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp 7.278.490.886,95 (mengalami penurunan sebesar Rp 538.923.597,05) dengan realisasi sebesar Rp6,496,041,900 atau 89.25 % dengan sisa anggaran Rp 782,448,986.95 atau 10.75 %. Untuk pendapatan asli daerah, target anggaran untuk tahun 2019 sebesar Rp 150,000,000,00 dan terealisasi sebesar Rp 255.175.000,00 atau 170,12%.

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2019 terdapat beberapa kegiatan yang tidak mencapai target yang ditetapkan antara lain :

1. Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
 - Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi
 - Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian
2. Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
 - Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha
 - Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi
 - Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
3. Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil
 - Peningkatan kualitas kewirausahaan
4. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - Peningkatan fungsi pelayanan pemerintah pada pelatihan koperasi dan UMKM
 - Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM
5. Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM

- 2.1.2. - Peningkatan Layanan Usaha Terpadu. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Secara keseluruhan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan IV tahun anggaran 2019 terlaksana dan belum memenuhi target yang ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) kegiatan.

2.1.3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya/terpenuhinya target kinerja program/kegiatan Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

- Kegiatan Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi jumlah Pagu Sebesar Rp. 893.936.000,- setelah perubahan berkurang sebesar Rp. 36.724.000,- menjadi 857.212.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 758.536.300,- atau 88,80% hal ini disebabkan Belanja Perengkapan Peserta (Tas) dan sewa ruang pertemuan tidak digunakan karena acara di Balai Desa. Dan peserta dari Daerah Belitung dan Belitung tidak datang pada acara RAT di Hotel Bangka City. Serta efisiensi dengan tidak membayar honorarium Narasumber dari dalam daerah.
- Kegiatan Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian jumlah Pagu Sebesar Rp. 200.383.500,- setelah perubahan berkurang sebesar Rp. 22.300.000,- menjadi 178.083.500,- dengan realisasi Rp. 156.729.600,- atau 88,01% hal ini disebabkan Ada sekitar 10 orang peserta dari Kabupaten Belitung dan Belitung Timur tidak hadir mengikuti penerapan Buku Wajib Koperasi dan efisiensi tidak membayar honorarium Narasumber.

2. Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

- Kegiatan Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha jumlah Pagu Rp. 424.713.500,- setelah perubahan berkurang sebesar Rp. 202.624.000,- menjadi 222.089.500,- dengan realisasi Rp. 180.735.300,- atau 81,38% karena untuk belanja sewa ruang pertemuan dan honorarium Narasumber tidak dibayar dan Belanja Makan dan Minum kegiatan yang tidak dilaksanakan.
- Kegiatan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi jumlah Pagu Rp. 505.516.000,- setelah perubahan berkurang sebesar Rp. 124.554.000,- menjadi 380.962.000,- dengan realisasi Rp. 326.275.100,- atau 85,65% dikarenakan ada beberapa peserta Bimtek yang tidak hadir yang menyebabkan anggaran sewa kamar, belanja makan minum rapat dan uang saku peserta tidak dibayar serta efisiensi jumlah narasumber kegiatan .
- Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Koperasi jumlah Pagu Rp. 871.115.000,- setelah perubahan berkurang sebesar Rp. 268.947.000,- menjadi 602.168.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 475.904.750,- atau 79,03% dikarenakan ada 2 orang PPKL yang mengundurkan diri sehingga gajinya tidak dibayar dan transport narasumber tidak dicairkan.

3. Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil

- Kegiatan Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil Dengan pagu dana kegiatan Rp. 1.396.231.000,- setelah perubahan berkurang sebesar Rp. 169.155.000,- menjadi 1.227.076.000,- dengan realisasi sebesar 1.107.280.500,- atau 90,24% dikarenakan penghematan belanja sewa panggung/stand dan dekorasi untuk pameran serta efisiensi belanja jasa tenaga asistensi.
 - Kegiatan Peningkatan kualitas kewirausahaan jumlah Dengan pagu dana kegiatan Rp. 144.668.000,- setelah perubahan bertambah sebesar Rp. 300.000.000,- menjadi 444.668.000,- dengan realisasi sebesar 340.436.400,- atau 76,56% dikarena belanja sewa kamar, makan minum rapat tidak dibayar semua, karena peserta tidak hadir semua (kegiatan Fasilitas Babel Akademi) serta efisiensi belanja pihak ketiga dan honorarium nara sumber.
4. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Kegiatan Peningkatan fungsi pelayanan pemerintah pada pelatihan koperasi dan UMKM dengan pagu dana kegiatan Rp. 544.650.000,- setelah perubahan berkurang sebesar Rp. 11.460.000,- menjadi 533.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 458.357.600,- atau 85,98 % karena terdapat efisiensi untuk belanja peralatan dapur gizi (pengadaan selimut dan sprai 1 paket) serta untuk belanja rutin seperti Belanja Listrik, telepon dibayar berdasarkan jumlah tagihan sesuai dengan penggunaan.
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM dengan pagu dana kegiatan Rp. 1.676.667.000,- setelah perubahan berkurang sebesar Rp. 20.084.000,- menjadi 1.656.583.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.401.243.050,- atau 84,59% dikarena adanya perubahan (Pengurangan) jumlah angkatan pelatihan dari 5 menjadi 3 jenis kegiatan pelatihan dan efisiensi anggaran belanja makan minum kegiatan, sewa kamar, sewa ruang rapat, dan pengalihan lokasi kegiatan di pulau Belitung ke Pangkalpinang.
5. Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM
- Kegiatan Peningkatan Layanan Usaha Terpadu dengan pagu dana kegiatan Rp. 721.900.000,- setelah perubahan berkurang sebesar Rp. 440.634.000,- menjadi 281.266.000,- realisasi sebesar 216.600.700,- atau 77,01% dikarenakan karena pengadaan mesin untuk pengelolaan bahan baku karet tidak mampu disediakan oleh pihak ketiga.

2.1.4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

Implikasi yang ditimbulkan dari ketidak tercapainya target pada beberapa program/kegiatan sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2019 yaitu realisasi anggaran pada anggaran Perubahan Tahun anggaran 2019.

2.1.5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi Dalam upaya untuk meminimalisir realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam program/kegiatan, maka di butuhkan upaya sebagai berikut:

- a. Penetapan target berupa output kegiatan disesuaikan dengan kemampuan anggaran agar target dapat tercapai;
- b. Pelaksanaan program/kegiatan agar tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga realisasi target dan anggaran dapat tercapai dan selaras dengan yang ditetapkan dalam DPA;
- c. Pengesahan DPA diharapkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.

Evaluasi pelaksanaan Renja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2019 sampai dengan triwulan IV dan perkiraan capaian realisasi target Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
	TOTAL BELANJA	24,919,696,984	24,418,773,386.95	100	22,309,129,600	91.84
	Pendapatan	150.0000.000	150.000.000	100	255.175.000	
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7,817,414,484	7,278,490,886.95	100	6,496,041,900	89.25
II	BELANJA LANGSUNG	17,252,282,500	17,290,282,500	100	16,068,262,700	92.93
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	4,227,536,500	5,980,767,500	100	5,754,479,900	96.22
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,501,002,500	4,414,648,500	100	4,247,813,400	96.22
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	538,944,000	1,353,419,000	100	1,325,043,100	97.90
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	150,000,000	180,000,000	100	161,850,000	89.92
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37,590,000	32,700,000	100	19,773,400	60.47
B	Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	1,309,290,500.00	1,218,276,500.00	100	1,081,796,900	88.80
1	Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	893,936,000	857,212,000	100	758,536,300	88.49
2	Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian	200,383,500	178,083,500	100	156,729,600	88.01
3	Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	214,971,000	182,981,000	100	166,531,000	91.01

C	Program Peningkatan PEMBERDAYAAN dan Pengembangan Koperasi	1,801,344,500	1,205,219,500	100	982,915,150	81.55
1	Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha Koperasi	424,713,500	222,089,500	100	180,735,300	81.38
2	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi	505,516,000	380,962,000	100	326,275,100	85.65
3	Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	871,115,000	602,168,000	100	475,904,750	79.03
D	Program Peningkatan PEMBERDAYAAN Usaha Kecil	3,340,674,000	2,784,850,00	100	2,546,074,000	91.43
1	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	1,396,231,000	1,227,076,000	100	1,107,280,500	90.24
2	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	1,799,775,000	1,113,106,000	100	1,098,357,100	98.67
3	Peningkatan Kualitas Kewirausahaan	144,668,000	444,668,000	100	340,436,400	76.56
E	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	5,851,537,000	5,819,903,000	100	5,486,396,050	94.27
1	Peningkatan Fungsi Pelayan Pemerintah pada Pelatihan Koperasi dan UMKM	544,650,000	533,100,000	100	458,357,600	85.98
2	Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM (DAK)	3,630,220,000	3,630,220,000	100	3,626,795,400	99.91
3	Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM	1,676,667,000	1,656,583,000	100	1,401,243,050	84.59
F	Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM	721,900,000	281,266,000	100	216,600,700	77.01
1	Peningkatan Layanan Usaha Terpadu	721,900,000	281,266,000	100	216,600,700	77.01

Tabel C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah/d Tahun 2019

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi dan UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Rutin									
1 01	Bidang Urusan									
1 01 01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Perkantoran		3.646.200.338		3.300.000.000	3.218.763.750	98%			
1 01 01 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan (%)	2.916.535.078		2.420.000.000	2.472.697.350	102%	2.480.000.000		
1 01 01 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan (%)	504.050.000		515.000.000	549.578.400	107%	600.000.000		
1 01 01 03	Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya (%)			100.000.000	81.175.000	81%			
1 01 01 04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (%)	118.100.000		110.000.000	49.109.600	45%	150.000.000		
1 01 01 05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% (Dokumen)	107.515.260		140.000.000	59.063.400	42%	150.000.000		
1 01 01 06	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% (Dokumen)			15.000.000	7.140.000	48%			

1	01	02		Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi		453.788.510		1,500,000,000	614.307.840	41%			
1	01	02	01	Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi aktif	153.009.930		930.000.000	330.639.500	36%	1.347.000.000		
1	01	02	02	Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian	Persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi	134.960.280		350.000.000	187.090.400	53%	573.000.000		
1	01	02	03	Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	Persentase peningkatan koperasi berkualitas	165.818.300		220.000.000	96.577.940	44%	500.000.000		
1	01	03		Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi		739.062.370		1,150,000,000	605.011.630	53%			
1	01	03	01	Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha Koperasi	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	235.006.740		300.000.000	58.094.550	19%	1.200.000.000		
1	01	03	02	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan investasi koperasi sektor kelautan dan perikanan	134.193.970		350.000.000	175.700.130	50%	900.000.000		
1	01	03	03	Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	Persentase peningkatan investasi koperasi sektor pariwisata	369.861.660		500.000.000	371.216.950	74%	835.000.000		
1	01	04		Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil		3.013.139.267		21,645,000,000	3.680.045.900	17%			
1	01	04	01	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Persentase pertumbuhan volume usaha pelaku usaha kecil	541.202.447		1.410.000.000	1.284.876.000	91%	1.688.000.000		
1	01	04	02	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	Persentase pertumbuhan pelaku usaha kecil	976.782.320		5.235.000.000	1.832.383.300	35%	6.250.000.000		
1	01	04	03	Peningkatan Kualitas Kewirausahaan	Persentase pertumbuhan produk usaha kecil yang dikembangkan	1.495.154.500			459.594.400				
1	01	04	04	Pembangunan Gedung Pemasaran Produk KUKM	Pertumbuhan produk usaha kecil yang tersertifikasi			15.000.000.000	103.192.200	1%			

1	01	05		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		2.009.506.540		3,535,000,000	2.907.202.350	82%		
1	01	05	01	Peningkatan Fungsi Pelayan Pemerintah pada Pelatihan Koperasi dan UMKM		1.118.615.000		535.000.000	408.440.150	76%	700.000.000	
1	01	05	02	Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM	Persentase SDM Koperasi terlatih	732.776.160		3.000.000.000	2.498.762.200	83%	3.000.000.000	
1	01	05	03	Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Persentase SDM Usaha Kecil terlatih	158.115.3680						
1	01	06		Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM		818.300.980						
1	01	06	01	Peningkatan Layanan Usaha Terpadu	Pertumbuhan produk parekraf	818.300.980		1.460.000.000	71.830.100	5%	1.585.000.000	

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- Penyelenggaraan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

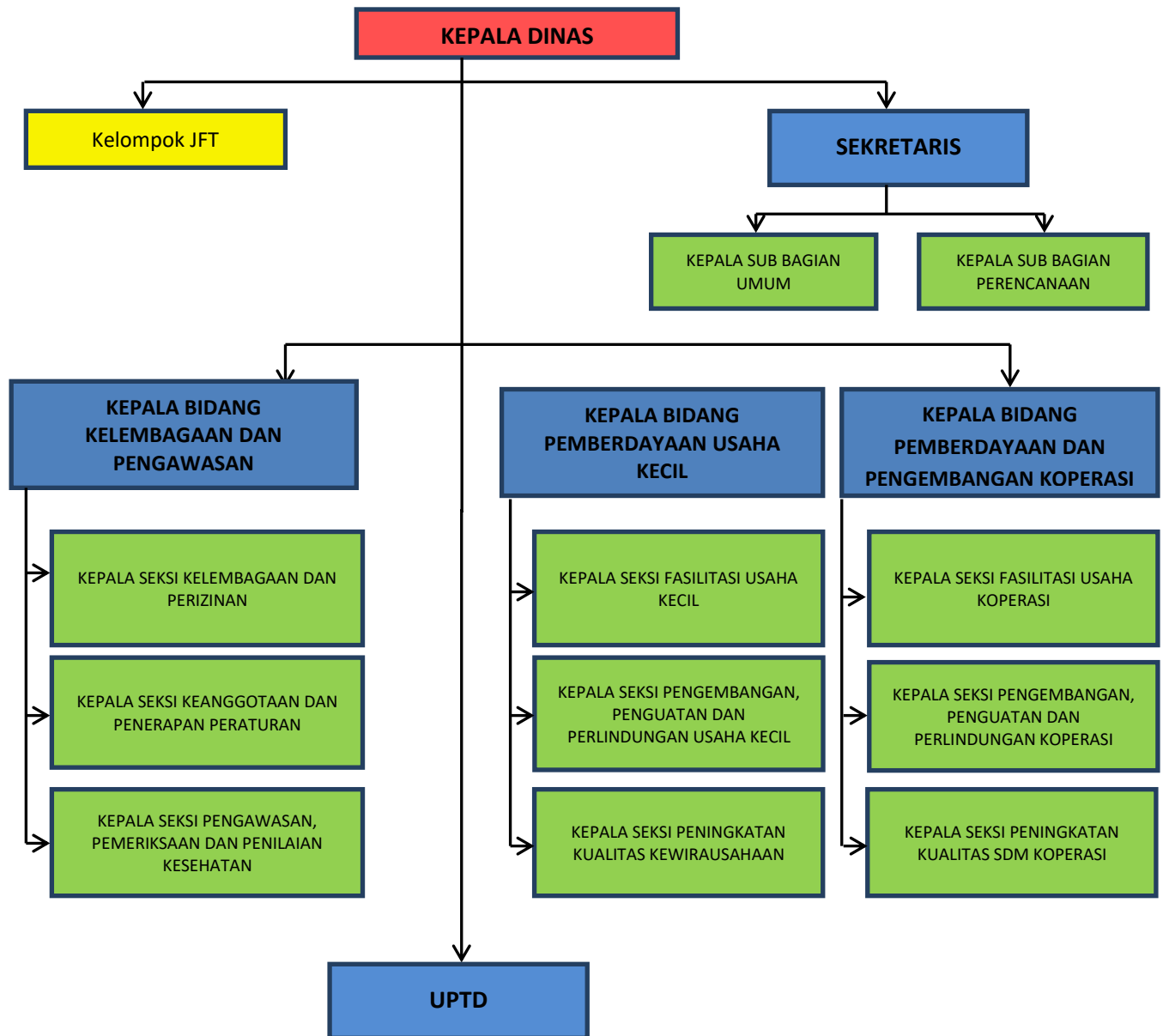
No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Bertambahnya Koperasi & Bertambahnya UMKM			21 Unit & 3,500 Unit	21 Unit & 3,500 Unit	21 Unit & 3,500 Unit			30 Unit & 3,617 unit	48 Unit & 3,991 Unit	27 Unit & 3,225 Unit			14 10
2	Bertambahnya Jumlah Koperasi Berkualitas			33 Unit	33 Unit	33 Unit			30 Unit	36 Unit	28 Unit			
3	Bertambahnya Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional			1 Unit	1 Unit	1 Unit			2 Unit	5 Unit	5 Unit			
4	Persentase Pelaksanaan RAT Koperasi			56%	56%	57%			40%	39.82%	39.82%			71.4
5	Bertambahnya Koperasi Skala Besar			3 Unit	3 Unit	1 Unit			3 Unit	6 Unit	6 Unit			100
6	Persentase Koperasi Aktif			82%	83%	84%			80%	78.92%	68.42%			97.5
7	Bertambahnya Ragam Kemasan KUMKM			4 Jenis	4 Jenis	6 Jenis			20 Jenis	38 Jenis	69 Jenis			500

8.	Diterbitkannya Sertifikat Halal untuk UMKM			0 Unit	5 Unit	20 Unit			0 Unit	16 Unit	40 unit			0	
9.	Meningkatnya Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil			250 Unit	252 Unit	252 Unit			415 Unit	800 Unit	166 Unit			166	
10	Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Usaha Menengah			8 Unit	8 Unit	8 Unit			10 Unit	40 Unit	5 Unit			125	
11	Terpilihnya UMKM Berprestasi Tingkat Nasional			0 Unit	0 Unit	1 Unit			0 Unit	0 Unit	1 Unit			0	
12	Bertambahnya Modal Sendiri Koperasi			66 Milyar	66 Milyar	67 Milyar			66,128 Milyar	67,055 Milyar	60,596 Milyar			10	
13	Persentase Tersalurkannya Kredit Oleh Perbankan Kepada UMKM dari Total Kredit yang Disalurkan			52%	53%	54 %t			57%	68.01%	44.70%			10	
14	PT. Jamkrida Babel Menjamin UMKM				0 Unit	212 Unit				0 Unit	0 Unit				
15	- Tersalurannya Kredit				2,300 Triliun					9,752 Triliun					
	Perbankan Kepada KUMKM					2,400 Triliun					3,213 Triliun				
	- Tersalurannya Dana				22 Milyar						22,23 Milyar				
	BUMN/Csr kepada KUMKM					23 Milyar				6,69 Milyar					
	- Tersalurannya Dana				76 Milyar						10,015 Milyar				
	Bantuan Hibah Pemerintah					77 Milyar					2,790 Milyar				
	- Tersalurannya Dana LPDB				1,7 Milyar										
	Sebesar					1,7 Milyar									
	16	Bertambahnya Volume Usaha Koperasi			650 Milyar	660 Milyar	670 Milyar			813 Milyar	1030 Milyar	518 Milyar			125.0
17	Bertambahnya Volume Usaha UMKM			2 Triliun	2 Triliun	2 Triliun			1.21 Triliun	1,29 Triliun	1,45 Triliun			6	
18	Bertambahnya Jumlah Tenaga Kerja Yang ditampung oleh Koperasi			200 Orang	200 Orang	200 Orang			311 Orang	366 Orang	366 Orang			1	
	Bertambahnya Jumlah Tenaga Kerja Yang ditampung oleh UMKM			21.000 Orang	21.000 Orang	21.000 Orang			22.246 Orang	25.829 Orang	5.692 Orang			10	
19	Pembangunan Pasar Tradisional Yang Tersebar di 7				4 Unit	5 Unit				12 Unit	2 Unit				

	Kab/Kota												
20	Terwujudnya yang Memasarkan Produknya Keluar Daerah/Antar Daerah/Antar Pulau			5 Unit	5 Unit	18 Unit							
								11 Unit	38 Unit	25 Unit			
21	Meningkatnya Jumlah Koperasi Menangani Perikanan				2%	2%				3.80%	28.70%		
	Meningkatnya Jumlah Koperasi Menangani Perkebunan				4%	4%				25.97%	3.80%		
	Meningkatnya Jumlah Koperasi Menangani Pariwisata				1%	1%				1.89%	1%		
	Meningkatnya Jumlah Koperasi Menangani Perdagangan				6%	6%				10.00%	2%		
	Meningkatnya Jumlah Koperasi Menangani Pangan				5%	5%				1.64%	1%		
22	Terlaksananya Rapat Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat				6 Kali	6 Kali					8 Kali	6 Kali	
					4 Kali	4 Kali					6 Kali	4 Kali	
					10 Kali	10 Kali					12 Kali	12 Kali	
23	Terwujudnya Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga Perbankan				6 Buah	12 Buah					6 Buah	7 Buah	
					1 Buah	2 Buah					1 Buah	2 Buah	
					14 Buah	14 Buah					14 Buah	11 Buah	
24	Terlaksananya Pelaksanaan Rapat Forum				3 Kali	3 Kali					3 Kali	2 Kali	
25	Terwujudnya Koordinasi dan Kerjasama Pengembangan Produk Kreatif di 7 Kab/Kota				2 Kali	2 Kali					2 Kali	0 klai	
26	Terbentuknya				8 Tim	8 Tim					8 Tim	8 Tim	

	Tim Pengawasan Koperasi, dan														
	Pokja Pengawasan Koperasi				1 Pokja	0				1 Pokja	0				
27	Bertambahnya SDM Pembina				12 Orang	12 Orang				5 Orang	5 Orang				
28	Terlatihnya SDM Pembina				12 Orang	12 Orang				19 Orang	19 Orang				
29	Bertambahnya SDM Koperasi				200 Orang	200 Orang				960 Orang	73 Orang				
	&			&											
	Tenaga Kerja UMKM					3.500 Orang						&	3.083 Orang		
30	Terlatihnya SDM Koperasi				400 Orang	400 Orang				478 Orang	278 Orang				
	Terlatihnya SDM UMKM				200 Orang	250 Orang				419 Orang	710 Orang				
31	Terwujudnya Jaringan Komunikasi Informasi Koperasi dan UMKM				0 Buah	2 Buah				0 Buah	0 Buah				
32	Bertambahnya Penyuluh dan Pencacah Data Koperasi dan UMKM				5 Orang	5 Orang				5 Orang	5 Orang				
33	Terwujudnya Pembangunan Kantor Dinas,				0 Unit	1 Unit				0 Unit	0 Unit				
	Balatkop dan UMKM				1 Unit	1 Unit				1 Unit	1 Unit				
	Serta Gedung Promosi dan Bisnis KUMKM				0 Unit	0 Unit				0 Unit	0 Unit				
34	Pertumbuhan Koperasi Aktif						886 Unit	53 Unit				812 Unit	0 Unit		
35		Pertumbuhan Koperasi Sehat					15 Unit	15 Unit				75 Unit	7 Unit		
36	Pertumbuhan Koperasi Berkualitas						33 Unit	23 Unit				166 Unit	42 Unit		
37		Pertumbuhan UMKM						294.035 Unit	2.941 Unit				291.799 Unit	(25.516) Unit	
38	Peningkatan Usaha Kecil Menjadi Usaha Menengah						749 Unit	15 Unit				879 Unit	(304) Unit		
39		Peningkatan Jumlah Bantuan Permodalan Usaha Kepada KUKM						239.790 Milyar	9.690 Milyar				182.969 Milyar	111.466 Milyar	
40	Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha KUKM Yang Mengakses Bantuan Permodalan						40.460 Unit	1.220 Unit				13.264 Unit	15.220 Unit		
41	Terlatihnya SDM Koperasi dan UMKM						305 Orang	305 Orang				359 Orang	750 Orang		

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016, Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Umum.
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, membawahkan:
 1. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
 2. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan;
 3. Seksi Izin Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan.
- d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, membawahkan:

1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi;
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi.
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, membawahkan:
1. Seksi Fasilitas Usaha Kecil;
 2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil;
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas:
1. Subbagian Tata Usaha
 2. Seksi Penyelenggara Pelatihan
 3. Seksi Peningkatan Mutu dan Layanan KUKM
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Guna mendukung kinerja dan berjalannya tugas serta fungsi dari organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia/Aparatur yang dimiliki. Hingga Tahun 2020, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didukung pegawai sebanyak 48 orang dengan profil demografi sebagai berikut:

NO	KRITERIA	RINCIAN	JML PNS	JML CPNS	TOTAL
I	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	10	-	10
		Gol. III	28	-	28
		Gol. II	10	-	10
		Gol. I	-	-	-
		JUMLAH	48	-	48
II	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	8	-	8
		S1	26	-	26
		D. IV	-	-	-
		D. III	4	-	4
		D. II	-	-	-
		D. I	-	-	-
		SMA / sederajat	10	-	10
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD / sederajat	-	-	-
		JUMLAH	48	-	48
III	Berdasarkan Jabatan	Struktural			
		- Eselon II	1	-	1
		- Eselon III	5	-	5
		- Eselon IV	12	-	12
		Fungsional Tertentu	5	-	2
		Fungsional Umum	25		24
		JUMLAH	48	-	48

Dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Renstra Tahun 2018-2022 terdapat tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai berikut:

Tujuan strategis, sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Skala Usaha KUMKM	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi	Presentase koperasi aktif
		Meningkatnya Pertumbuhan KUMKM	Persentase pertumbuhan KUKM
		Meningkatnya Kualitas SDM KUKM	Persentase SDM KUKM yang berkualitas

Sumber : Renstra DKUKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal Renja DKUKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan masing-masing Bidang di lingkungan DKUKM, terlampir pada tabel review terhadap rancangan awal RKPD berikut ini:

Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Dinas Koperasi dan UKM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4,708,556,000						
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				226,650,000						
	Sub Kegiatan 1 : Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				226,650,000						
	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam		5 Koperasi		112,150,000						
	Jumlah Peserta Diseminasi Pembentukan Koperasi										
	Jumlah Akta Notaris bagi Koperasi		14 Koperasi		114,500,000						
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				367,662,000						
	Sub Kegiatan 1 : Meningkatkan Akuntabilitas, kepercayaan, Kepatuhan Kesenambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan Masyarakat				184,444,000						
	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)		40 Orang		93,626,000						
	Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi		60 Orang		90,818,000						

	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Sistem Pengendalian Intern (SPI)		50 Orang							
	Sub Kegiatan 2 : Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan terbentuknya Koperasi yang kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh serta akuntabel				183,218,000					
	Jumlah Koperasi yang mematuhi Peraturan Perundang-undangan		50 Koperasi		98,828,000					
	Jumlah Koperasi yang akan dibubarkan		5 Koperasi		84,390,000					
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				182,797,500					
	Sub Kegiatan 1 : Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi				182,797,500					
	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya		10 Koperasi		41,125,000					
	Sub Kegiatan 2 ; Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi									
	Jumlah Koperasi berprestasi		5 Koperasi		141,672,500					
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				755,148,000					
	Sub Kegiatan 2 : Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha				755,148,000					
	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi Akses Pembiayaan		100 Orang							
	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Akses Pasar (Pameran/Promosi Koperasi)		5 Koperasi		396,500,000					
	Jumlah Peserta yang mendapatkan fasilitasi Kemitraan		10 koperasi							
	Jumlah PPKL yang terberdayakan (Bimtek 1 kali 40 rang dan Honorarium PPKL)		4 orang							
	Jumlah Peserta yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Usaha		120 Orang		358,648,000					
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				2,132,718,624					
	Sub Kegiatan 1 : Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan				2,132,718,624					
	Jumlah Wirausaha Pemula yang mengikuti Magang		100 Orang		547,802,000					
	Jumlah Peserta yang mengikuti Gerakan Kewirausahaan		1000 Orang							
	Jumlah pembina/Pendamping/ Penyuluh/ Konsultan PLUT yang mengikuti Bimbingan teknis peningkatan kapasitas		80 Orang		771,175,000					
	Jumlah Database UMKM		1 Dokumen		813,741,624					
	Jumlah Peserta Forum Koordinasi UMKM		100 Orang							
	Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi Kemitraan		30 Orang							
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				2,288,192,000					
	Sub Kegiatan 1 : Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi				2,288,192,000					

	Jumlah UMKM yang mengikuti Diseminasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk		1000 Orang		1,430,258,000					
	Jumlah UMKM yang mendapatkan Bimtek Peningkatan Kapasitas Usaha		420 Orang							
	Jumlah UMKM yang mengikuti Promosi dan Pemasaran Produk		100 Orang		857,934,000					
	Jumlah UMKM yang mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Usaha		2000 Orang							
8	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				450,000,000					
	Sub Kegiatan 1 : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				450,000,000					
	Jumlah Anggota Koperasi yang dilatih		90 peserta		350,000,000					
	Jumlah Kajian Mutu Pelatihan yang disusun		1 Dokumen		100,000,000					
	TOTAL				11,111,724,124					

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32 sebagai berikut:

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dinas Koperasi dan UKM

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Nilai Sakip PD (pakai angka)	4	
			survey kepuasan pelayanan internal	100%	
	Kegiatan 1 : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	5 Dokumen	
	Sub Kegiatan 1 : Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		Jumlah dok perencanaan PD		

	Sub Kegiatan 2 : Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan		Jumlah RKA/DPA yang tersusun	13	
	Sub Kegiatan 3 : Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		Jumlah dok evaluasi PD (DALEV)	4	
	Sub Kegiatan 4 : Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah		jumlah kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	1	
	Sub Kegiatan 5 : Evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dok Evaluasi kinerja PD (LKPJ, LAKIP, LPPD dan ATA)	1	
	Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan		Survey kepuasan pelayanan keuangan	100%	
	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan	45	
	Sub Kegiatan 2 : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		jumlah pelaksana tugas ASN	45	
	Sub Kegiatan 3 : Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan		Jumlah laporan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	1	
	Sub Kegiatan 4 : Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran		Jumlah laporan keuangan bulanan Semesteran	18	
	Sub Kegiatan 5 : Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1	
	Kegiatan 3 : Administrasi Umum		survey kepuasan pelayanan umum	100%	
	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa surat menyurat		Jumlah Barang yang dikirim		
			Jumlah Materai		
	Sub Kegiatan 2 : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah tagihan listrik		
			Jumlah tagihan komunikasi		
			Jumlah tagihan Air		
	Sub Kegiatan 3 : Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor		
	Sub Kegiatan 4 : Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS		Jumlah pegawai non PNS yang memiliki jaminan kesehatan		
	Sub Kegiatan 5 : Penyediaan jasa jaminan ketenagakerjaan non PNS		Jumlah pegawai non PNS yang memiliki jaminan ketenagakerjaan		
	Sub Kegiatan 6 : Penyediaan jasa jaminan barang milik negara		Jumlah barang milik negara yang dijamin		
	Sub Kegiatan 7 : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		jumlah kendaraan operasional yang dipelihara		
	Sub Kegiatan 8 : Penyediaan jasa Administrasi keuangan		Jumlah pengelola administrasi keuangan		
	Sub Kegiatan 9 : Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran		Jumlah pelayanan administrasi perkantoran		
	Sub Kegiatan 10 : Penyediaan jasa kebersihan kantor		Jumlah pengelola jasa kebersihan kantor		
	Sub Kegiatan 11 : Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		jumlah peralatan kerja yang diperbaiki		

	Sub Kegiatan 12 : Penyediaan alat tulis kantor		jumlah kelengkapan alat tulis kantor (jumlah pegawai yang difasilitasi ATK)		
	Sub Kegiatan 13 : Penyediaan barang cetak dan penggandaan		jumlah barang cetak		
			Jumlah penggandaan		
	Sub Kegiatan 14 : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah komponen instalasi listrik		
	Sub Kegiatan 15 : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		
			jumlah perlengkapan kantor		
	Sub Kegiatan 16 : Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah peralatan rumah tangga		
	Sub Kegiatan 17 : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan		
	Sub Kegiatan 18 : Penyediaan bahan logistik kantor		jumlah bahan logistik kantor		
	Sub Kegiatan 19 : Penyediaan makan dan minum		Jumlah makan dan minum Tamu		
			Jumlah makan dan minum rapat		
	Sub Kegiatan 20 : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah		
			Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah		
	Sub Kegiatan 21 : Pengadaan mobil jabatan		Jumlah mobil jabatan yang diadakan		
	Sub Kegiatan 22 : Pengadaan kendaraan dinas/oprasional		Jumlah kendaraan dinas/oprasional		
	Sub Kegiatan 23 : Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas		Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas		
	Sub Kegiatan 24 : Pengadaan perlengkapan gedung kantor		jumlah perlengkapan gedung kantor		
	Sub Kegiatan 25 : Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas		jumlah peralatan rumah jabatan/tugas		
	Sub Kegiatan 26 : Pengadaan peralatan gedung kantor		Jumlah peralatan gedung kantor		
	Sub Kegiatan 27 : Pengadaan mebeleur		Jumlah mebelair		
	Sub Kegiatan 28 : Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan		Jumlah rumah jabatan yang dipelihara		
	Sub Kegiatan 29 : Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		Jumlah rumah dinas yang dipelihara		
	Sub Kegiatan 30 : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		jumlah gedung kantor yang dipelihara		
	Sub Kegiatan 31 : Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan		jumlah mobil jabatan yang dipelihara		
	Sub Kegiatan 32 : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional		Jumlah mobil oprasional yang dipelihara		
	Sub Kegiatan 33 : Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Rumah jabatan/dinas		Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara		
	Sub Kegiatan 34 : Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		

	Sub Kegiatan 35 : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas		jumlah peralatan rumah dinas/jabatan yang dipelihara		
	Sub Kegiatan 36 : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		
	Sub Kegiatan 37 : Pemeliharaan rutin/berkala meubelair		jumlah meubelair yang dipelihara		
	Sub Kegiatan 38 : Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan		jumlah rumah jabatan yang di rehabilitasi		
	Sub Kegiatan 39 : Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas		jumlah rumah dinas yang direhabilitasi		
	Sub Kegiatan 40 : Rehabilitasi sedang/berat Rumah gedung kantor		jumlah gedung kantor yang direhabilitasi		
	Sub Kegiatan 41 : Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan		jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi		
	Sub Kegiatan 42 : Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional		jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhabilitasi		
	Sub Kegiatan 43 : Pembangunan Gedung Kantor		Jumlah Gedung kantor yang dibangun		
	Kegiatan 4 : Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		survey kepuasan pelayanan kepegawaian	100%	
	Sub Kegiatan 1 : Pengadaan mesin/kartu absensi		Jumlah mesin/kartu absensi		
	Sub Kegiatan 2 : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Jumlah Pakaian dinas		
	Sub Kegiatan 3 : Pengadaan pakaian kerja lapangan		Jumlah Pakaian kerja lapangan		
	Sub Kegiatan 4 : Pengadaan pakaian kopri		jumlah pakaian kopri		
	Sub Kegiatan 5 : Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu		jumlah pakaian khusus hari2 tertentu		
	Sub Kegiatan 6 : Pemulangan pegawai yang pensiun		Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan		
	Sub Kegiatan 7 : Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas		Jumlah pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas yang dipulangkan		
	Sub Kegiatan 8 : Pemindahan tugas belajar		Jumlah pegawai tugas belajar yang dipindahkan		
	Sub Kegiatan 9 : Pendidikan dan pelatihan formal		jumlah pegawai yang ikut pendidikan dan pelatihan formal		
	Sub Kegiatan 10 : Sosialisasi peraturan peundang-undangan		Jumlah peserta sosialisasi		
	Sub Kegiatan 11 : Bimbingan teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan		jumlah peserta bimbingan teknis		
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase rekomendasi izin Usaha Simpan Pinjam yang dikeluarkan	20%	
	Kegiatan 1 : Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah rekomendasi /Verifikasi ijin Usaha yang dikeluarkan	5 Koperasi	

	Sub Kegiatan 1 : Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam	5 Koperasi	
			Jumlah Peserta Diseminasi Pembentukan Koperasi	210 Orang	
			Jumlah Akta Notaris bagi Koperasi	14 Koperasi	
	Kegiatan 2 : Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah izin yang dikeluarkan untuk pembukaan kantor cabang	0	
	Sub Kegiatan 1 : Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		-	-	
	Sub Kegiatan 2 : Sistem Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		-	-	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Koperasi Aktif	70%	
	Kegiatan 1 : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Koperasi yang diawasi	50 Koperasi	
			Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	20 Koperasi	
			Jumlah Koperasi yang membayar Pajak	10 Koperasi	
			Jumlah Koperasi yang mampu menyusun Laporan Keuangan	30 Koperasi	
			Jumlah Koperasi yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	10 Koperasi	
			Jumlah Koperasi yang dibubarkan	5 Koperasi	
	Sub Kegiatan 1 : Meningkatkan Akuntabilitas, kepercayaan , Kepatuhan Kesenambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan Masyarakat		Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)	35 Orang	
			Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi	40 Orang	
			Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Sistem Pengendalian Intern (SPI)	50 Orang	

	Sub Kegiatan 2 : Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan terbentuknya Koperasi yang kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh serta akuntabel		Jumlah Koperasi yang mematuhi Peraturan Perundang-undangan	30 Koperasi	
			Jumlah Koperasi yang akan dibubarkan	5 Koperasi	
	Kegiatan 2 : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		-	-	
	Sub Kegiatan 1 : Meningkatkan Akuntabilitas, kepercayaan , Kepatuhan Kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan Masyarakat		-	-	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase Koperasi berkualitas	50%	
	Kegiatan 1 : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Koperasi Sehat	5 Koperasi	
	Sub Kegiatan 1 : Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi		Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	10 Koperasi	
	Sub Kegiatan 2 ; Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi		Jumlah Koperasi berprestasi	3 Koperasi	
			Jumlah Tokoh Penggerak Koperasi Berprestasi	2 Orang	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase SDM Koperasi yang terlatih	30%	
	Kegiatan 1 : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah pengurus dan anggota Koperasi yang tersertifikasi pelatihan	90 Orang	
			Jumlah Kajian Mutu Pelatihan yang tersedia	1 Dokumen	
	Sub Kegiatan 1 : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah Anggota Koperasi yang dilatih	90 Orang	
			Jumlah Kajian Mutu Pelatihan yang disusun	1 Dokumen	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase Koperasi yang diberdayakan	20%	
	Kegiatan 1 : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Koperasi yang usahanya meningkat	10 Koperasi	

		Jumlah Koperasi yang mendapatkan akses Pembiayaan	10 Koperasi	
		Jumlah PPKL yang terberdayakan	4 Orang	
		Jumlah Koperasi yang bermitra	10 Koperasi	
	Sub Kegiatan 1 : Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	-	-	
	Sub Kegiatan 2 : Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitas Akses Pembiayaan	90 Orang	
		Jumlah Koperasi yang mendapatkan Akses Pasar (Pameran/Promosi Koperasi)	5 Koperasi	
		Jumlah Peserta yang mendapatkan fasilitas Kemitraan	45 Koperasi	
		Jumlah Pembina dan PPKL yang mengikuti Bimtek Perkoperasian	40 Orang	
		Jumlah Peserta yang mendapatkan Fasilitas Pengembangan Usaha	120 Orang	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang diberdayakan	1%	
	Kegiatan 1 : Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Kecil yang melakukan penguatan kelembagaan	1000 Orang	
		Jumlah Konsultan PLUT yang diberdayakan	8 Orang	
		Jumlah UMKM yang bermitra	7 Orang	
	Sub Kegiatan 1 : Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Wirausaha Pemula yang mengikuti Magang	30 Orang	
		Jumlah Peserta yang mengikuti Gerakan Kewirausahaan	1000 Orang	
		Jumlah Database UMKM	1 Dokumen	
		Jumlah Peserta Forum Koordinasi UMKM	100 Orang	
		Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitas Kemitraan	30 Orang	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang dikembangkan	1%	

	Kegiatan 1 : Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		Jumlah UMKM yang meningkat volume usahanya	100 Orang	
			Jumlah Produk yang tersertifikasi dan terstandarisasi	200 Produk	
			Jumlah UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	200 Orang	
	Sub Kegiatan 1 : Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi		Jumlah UMKM yang mengikuti Diseminasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk	350 Orang	
			Jumlah UMKM yang mendapatkan Bimtek Peningkatan Kapasitas Usaha	420 Orang	
			Jumlah UMKM yang mengikuti Promosi dan Pemasaran Produk	14 Orang	
			Jumlah UMKM yang mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Usaha	200 Orang	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menganut prinsip *money follows program* dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan secara holistik, tematik, terintegratif, dan spasial dalam perencanaan pembangunan diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.

- Holistik-Tematik: untuk mencapai sasaran prioritas nasional, perlu koordinasi multi kementerian/lembaga.
- Integratif: pencapaian sasaran prioritas nasional perlu dilakukan secara terintegrasi dari berbagai sektor pembangunan dan jenjang pemerintahan.
- Spasial: perlu sinkronisasi lokasi pembangunan untuk meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 merupakan penjabaran tahun kelima atau tahun terakhir dalam pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama, oleh Pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia. Sampai dengan Rancangan Awal Renja ini disusun Rancangan RKP 2019 mengangkat tema **"Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas"**.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menjabarkan lebih rinci Prioritas Nasional (PN) ke dalam Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas Nasional (ProPN). Program kegiatan Dinas koperasi Usaha Kecil dan Menengah apabila dikaitkan dengan Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas Nasional (ProPN) adalah:

- Prioritas Nasional (PN): Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif
- Program Prioritas (PP): Peningkatan nilai tambah jasa produktif
- Kegiatan Prioritas (KP): Pengembangan kemitraan usaha mikro dan kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB)
- Proyek Prioritas Nasional (ProPN) yang disentuh adalah: perluasan kemitraan usaha, pengembangan kapasitas usaha, penguatan kapasitas kelembagaan kemitraan, penguatan

ekosistem (regulasi, infrastruktur, investasi, & HAKI), pelaksanaan diklat vokasi, peningkatan promosi dan advokasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Dalam rangka mewujudkan tercapainya visi misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022, yaitu **"Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi"** dan Misi Pertama Kepala Daerah yaitu *Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah*, maka Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2019 difokuskan untuk mencapai tujuan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni *meningkatnya pertumbuhan ekonomi*, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah: **"Meningkatkan nilai tambah, daya saing produk, skala usaha dan kualitas SDM KUMKM"**.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya "meningkatkan nilai tambah, daya saing produk, skala usaha dan kualitas SDM KUMKM" guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, secara spesifik menjabarkan langkah-langkah pencapaian tujuan menjadi beberapa opsi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan usaha kecil;
2. Meningkatkan pembinaan kelembagaan dan pengawasan koperasi;
3. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
4. Meningkatkan pemberdayaan Usaha Kecil, dan
5. Meningkatkan kinerja Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM

Secara lebih detail sasaran dari tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran dari peningkatan kualitas SDM KUMKM terlatih adalah:
 - a. Meningkatkan jumlah SDM koperasi yang terlatih pada sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pertambangan dan sektor pariwisata sebesar 10,32%;
 - b. Meningkatkan jumlah SDM usaha kecil yang terlatih pada sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pertambangan, sektor pariwisata dan sektor lain-lain sebesar 1,07%.
2. Sasaran dari pembinaan kelembagaan dan pengawasan koperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :
 - a. Meningkatkan pertumbuhan jumlah Koperasi aktif pada kawasan strategis Teluk Kelabat Belinyu, Minapolitan Lepar Pongok, Etalase Perikanan Selat Nasik dan Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga serta sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan pariwisata sebesar 15,5 %;

- b. Meningkatkan pertumbuhan jumlah kelembagaan koperasi pendukung pariwisata, koperasi sektor pertanian khususnya karet, lada dan sapi serta sektor kelautan dan perikanan sebesar 12,7 %;
 - c. Meningkatkan pertumbuhan jumlah koperasi berkualitas pada bidang kelautan dan perikanan, sektor pariwisata dan sektor pertanian sebesar 6,6 %.
3. Sasaran dari peningkatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi :
 - a. Meningkatkan volume usaha koperasi pada sektor pariwisata, koperasi pertanian, lada dan sapi, serta sektor kelautan dan perikanan sebesar 1%;
 - b. Meningkatkan investasi koperasi sektor kelautan dan perikanan sebesar 4%; dan
 - c. Meningkatkan investasi koperasi sektor pariwisata sebesar 7%.
4. Sasaran dari peningkatan pemberdayaan usaha kecil adalah:
 - a. Meningkatkan produk usaha kecil yang tersertifikasi pada sektor pertanian, perkebunan dan peternakan, sektor kelautan dan perikanan serta sektor pariwisata sebesar 540%;
 - b. Meningkatkan produk usaha kecil yang dikembangkan sebesar 8%;
 - c. Meningkatkan pelaku usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang melakukan kemitraan sebesar 6%;
 - d. Meningkatkan volume usaha pelaku usaha kecil sebesar 15%; dan
 - e. Meningkatkan jumlah wirausaha baru sebesar 15%.
5. Sasaran dari peningkatan kinerja pusat layanan usaha terpadu (PLUT) KUKM adalah meningkatkan pertumbuhan produk parekraf sebesar 10% pertahun dan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM.

Hubungan antara visi-misi Kepala Daerah dan tujuan-sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.3.
Keterkaitan Visi-Misi Kepala Daerah dan Tujuan Sasaran
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Beserta Target Pada Renja Tahun 2019

Visi RPJMD	Misi RPJMD	RPJMD		RENSTRA		Indikator Sasaran	Target Tahun 2019
		Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<i>Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi</i>	Misi 1: Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1. Meningkatkan produksi subsektor pertanian, peternakan dan perkebunan 2. Meningkatkan produksi sub sektor perikanan 3. Meningkatkan pembangunan pembangunan pariwisata 4. Meningkatkan produksi sektor pertambangan 5. Meningkatkan pembangunan berbasis industry 6. Menurunnya angka Pengangguran	Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan usaha kecil	- SDM koperasi - SDM Usaha kecil	- Persentase SDM koperasi terlatih - Persentase SDM Usaha kecil terlatih	10,3 1.07
				Meningkatkan pembinaan kelembagaan dan pengawasan koperasi	- Koperasi binaan provinsi - Kelompok strategis - Koperasi aktif	- Persentase Peningkatankoperasi aktif - Persentase Pertumbuhan kelembagaan koperasi - Peningkatan koperasi berkualitas	15,5 12,7 6,6
				Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan koperasi	- Volume usaha koperasi - Investasi koperasi sektor kelautan dan perikanan - Investasi koperasi sektor pariwisata	- Persentase Peningkatan volume usaha koperasi - Persentase Peningkatan investasi koperasi sektor kelautan dan perikanan - Persentase Peningkatan investasi koperasi sektor pariwisata	1 4 7
				Meningkatkan pemberdayaan Usaha Kecil	- Produk usaha kecil - Volume usaha kecil - Pelaku usaha kecil	- Persentase Pertumbuhan produk usaha kecil yang tersertifikasi - Persentase Pertumbuhan produk usaha kecil yang dikembangkan - Persentase Pertumbuhan volume usaha kecil - Persentase Pertumbuhan pelaku usaha kecil	540 8 15 15
				Meningkatkan kinerja Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)	- Produk parekraf - Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM	- Persentase Pertumbuhan produk parekraf - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM	10 92

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sasaran utama dalam upaya meningkatkan nilai tambah, daya saing produk, skala usaha dan kualitas SDM KUMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dengan meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan usaha kecil, meningkatkan pembinaan kelembagaan dan pengawasan koperasi, meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, meningkatkan pemberdayaan Usaha Kecil, dan meningkatkan kinerja Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM. Kelima sasaran ini didukung oleh 6 program yang kemudian diimplementasikan dalam beberapa kegiatan dan beberapa pekerjaan. Outcome program yang direncanakan merupakan target yang harus dicapai oleh masing-masing bidang pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tahun 2019 terdapat 6 (enam) Program dan 17 (tujuhbelas) kegiatan yang akan mendukung tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang terdiri dari 1 (satu) program rutin dan 5 (lima) program teknis dengan uraian kegiatan secara rinci yaitu:

1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

Kegiatan:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Kegiatan:

- 1) Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi
- 2) Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian
- 3) Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi

3. Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Kegiatan:

- 1) Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha
- 2) Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi
- 3) Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

4. Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil

Kegiatan:

- 1) Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil
- 2) Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil
- 3) Peningkatan kualitas kewirausahaan

5. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kegiatan:

- 1) Peningkatan Fungsi Pelayanan Pemerintah Pada Pelatihan Koperasi dan UMKM
- 2) Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM
- 3) Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM (DAK)

6. Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM

Kegiatan:

- 1) Peningkatan Layanan Usaha Terpadu

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Dinas Koperasi dan UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Bidang Urusan								
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Kegiatan 1 : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dok perencanaan dan evaluasi	Pangkalpinang		153,775,000	APBD			
	Sub Kegiatan 1 : Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dok perencanaan PD	Pangkalpinang			APBD			
	Sub Kegiatan 2 : Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan	Jumlah RKA/DPA yang tersusun				APBD			
	Sub Kegiatan 3 : Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dok evaluasi PD (DALEV)				APBD			
	Sub Kegiatan 4 : Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	jumlah kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD				APBD			
	Sub Kegiatan 5 : Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dok Evaluasi kinerja PD (LKPJ, LAKIP,				APBD			
	Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan pelayanan	Survey kepuasan			7,862,972,192	APBD			
	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Gaji dan	jumlah ASN yang terima gaji dan				APBD			
	Sub Kegiatan 2 : Penyediaan	jumlah pelaksana tugas ASN				APBD			
	Sub Kegiatan 3 : Pengelolaan dan	Jumlah laporan pengelolaan dan							

		Sub Kegiatan 4 : Penyusunan laporan	Jumlah laporan keuangan bulanan							
		Sub Kegiatan 5 : Penyusunan pelaporan	Jumlah laporan keuangan akhir							
		Kegiatan 3 : Administrasi Umum	survey kepuasan pelayanan umum			4,347,401,000				
		Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa surat	Jumlah Barang yang dikirim							
			Jumlah Materai							
		Sub Kegiatan 2 : Penyediaan jasa	Jumlah tagihan listrik							
			Jumlah tagihan komunikasi							
			Jumlah tagihan Air							
		Sub Kegiatan 3 : Penyediaan jasa	jumlah jasa peralatan dan							
		Sub Kegiatan 4 : Penyediaan jasa	Jumlah pegawai non PNS yang							
		Sub Kegiatan 5 : Penyediaan jasa	Jumlah barang milik negara yang							
		Sub Kegiatan 6 : Penyediaan jasa jaminan barang milik Negara	Jumlah pengelola administrasi keuangan							
		Sub Kegiatan 7 : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional	jumlah kendaraan operasional yang dipelihara							
		Sub Kegiatan 8 : Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran							
		Sub Kegiatan 9 : Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran							
		Sub Kegiatan 10 : Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki							
		Sub Kegiatan 11 : Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki							
		Sub Kegiatan 12 : Penyediaan alat tulis kantor	jumlah kelengkapan alat tulis kantor (jumlah pegawai yang difasilitasi ATK)							
		Sub Kegiatan 13 : Penyediaan barang cetak dan	jumlah barang cetak							
			Jumlah penggandaan							
		Sub Kegiatan 14 : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik							
		Sub Kegiatan 15 : Penyediaan peralatan	jumlah peralatan dan perlengkapan							
			jumlah perlengkapan							
		Sub Kegiatan 16 : Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga							
		Sub Kegiatan 17 : Penyediaan bahan	Jumlah bahan bacaan dan							
		Sub Kegiatan 18 : Penyediaan bahan	jumlah bahan logistik kantor							
		Sub Kegiatan 19 : Penyediaan makan	Jumlah makan dan minum Tamu							
			Jumlah makan dan minum rapat							

		Sub Kegiatan 20 : Rapat-rapat koordinasi	jumlah koordinasi dan konsultasi							
			Jumlah koordinasi dan konsultasi							
		Sub Kegiatan 21 : Pengadaan mobil	Jumlah mobil jabatan yang							
		Sub Kegiatan 22 : Pengadaan kendaraan	Jumlah kendaraan dinas/oprasional							
		Sub Kegiatan 23 : Pengadaan	Jumlah perlengkapan							
		Sub Kegiatan 24 : Pengadaan	jumlah perlengkapan							
		Sub Kegiatan 25 : Pengadaan peralatan	jumlah peralatan rumah							
		Sub Kegiatan 26 : Pengadaan peralatan	Jumlah peralatan gedung kantor							
		Sub Kegiatan 27 : Pengadaan mebeleur	Jumlah mebelair							
		Sub Kegiatan 28 : Pemeliharaan	Jumlah rumah jabatan yang							
		Sub Kegiatan 29 : Pemeliharaan	Jumlah rumah dinas yang							
		Sub Kegiatan 30 : Pemeliharaan	jumlah gedung kantor yang							
		Sub Kegiatan 31 : Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	jumlah mobil jabatan yang dipelihara							
		Sub Kegiatan 32 : Pemeliharaan	Jumlah mobil oprasional yang							
		Sub Kegiatan 33 : Pemeliharaan	Jumlah perlengkapan							
		Sub Kegiatan 34 : Pemeliharaan	Jumlah perlengkapan							
		Sub Kegiatan 35 : Pemeliharaan	jumlah peralatan rumah							
		Sub Kegiatan 36 : Pemeliharaan	jumlah peralatan gedung kantor							
		Sub Kegiatan 37 : Pemeliharaan	jumlah meubelair yang dipelihara							
		Sub Kegiatan 38 : Rehabilitasi	jumlah rumah jabatan yang di							
		Sub Kegiatan 39 : Rehabilitasi	jumlah rumah dinas yang							
		Sub Kegiatan 40 : Rehabilitasi sedang/berat Rumah	jumlah gedung kantor yang direhabilitasi							
		Sub Kegiatan 41 : Rehabilitasi	jumlah mobil jabatan yang							
		Sub Kegiatan 42 : Rehabilitasi	jumlah kendaraan dinas/operasional							
		Sub Kegiatan 43 : Pembangunan Gedung	Jumlah Gedung kantor yang							
		Kegiatan 4 : Peningkatan Disiplin	survey kepuasan pelayanan			207,380,000				
		Sub Kegiatan 1 : Pengadaan	Jumlah mesin/kartu							
		Sub Kegiatan 2 : Pengadaan pakaian	Jumlah Pakaian dinas							
		Sub Kegiatan 3 : Pengadaan pakaian	Jumlah Pakaian kerja lapangan							
		Sub Kegiatan 4 : Pengadaan pakaian	jumlah pakaian kopri							
		Sub Kegiatan 5 : Pengadaan pakaian	jumlah pakaian khusus hari2							
		Sub Kegiatan 6 : Pemulangan pegawai	Jumlah pegawai pensiun yang							
		Sub Kegiatan 7 : Pemulangan pegawai	Jumlah pegawai yang tewas dalam							
		Sub Kegiatan 8 : Pemindahan tugas	Jumlah pegawai tugas belajar yang							
		Sub Kegiatan 9 : Pendidikan dan	jumlah pegawai yang ikut							

		Sub Kegiatan 10 : Sosialisasi peraturan	Jumlah peserta sosialisasi							
		Sub Kegiatan 11 : Bimbingan teknis	jumlah peserta bimbingan teknis							
		1PROGRAM PELAYPROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAMAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM								
		Kegiatan 1 : Penerbitan Izin Usaha	Jumlah rekomendasi			226,650,000				
		Sub Kegiatan 1 : Fasilitasi Izin Usaha	Jumlah rekomendasi Izin			112,150,000				
			Jumlah Peserta Diseminasi			114.500.000				
			Jumlah Akta Notaris bagi							
		Kegiatan 2 : Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah	Jumlah izin yang dikeluarkan untuk pembukaan kantor cabang							
		Sub Kegiatan 1 : Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								
		Sub Kegiatan 2 : Sistem Pelayanan								
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								
		Kegiatan 1 : Pemeriksaan dan	Jumlah Koperasi yang diawasi			367.662.000				
			Jumlah Koperasi yang			93.626.000				
			Jumlah Koperasi yang membayar							
			Jumlah Koperasi yang mampu							
			Jumlah Koperasi yang menerapkan							
			Jumlah Koperasi yang dibubarkan							
		Sub Kegiatan 1 : Meningkatkan	Jumlah Peserta yang mengikuti			90.818.000				
			Jumlah Peserta Bimtek							
			Jumlah Peserta yang mengikuti							
		Sub Kegiatan 2 : Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan terbentuknya Koperasi yang kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh serta akuntabel	Jumlah Koperasi yang mematuhi Peraturan Perundang-undangan			98,828,000				
			Jumlah Koperasi yang akan			84,390,000				
		Kegiatan 2 : Pemeriksaan dan								
		Sub Kegiatan 1 : Meningkatkan								
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI								

		Kegiatan 1 : Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Sehat			182,797,500				
		Sub Kegiatan 1 : Penilaian Permodalan,	Jumlah Koperasi yang dinilai			41,125,000				
		Sub Kegiatan 2 ; Mengukur Tingkat	Jumlah Koperasi berprestasi			141.6725.00				
			Jumlah Tokoh Penggerak							
		ROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								
		Kegiatan 1 : Pendidikan dan	Jumlah pengurus dan anggota			450.000.000				
			Jumlah Kajian Mutu Pelatihan							
		Sub Kegiatan 1 : Peningkatan	Jumlah Anggota Koperasi yang			350,000,000				
			Jumlah Kajian Mutu Pelatihan			100,000,000				
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								
		Kegiatan 1 : Pemberdayaan dan	Jumlah Koperasi yang usahanya			755.148.000				
			Jumlah Koperasi yang							
			Jumlah PPKL yang terberdayakan							
			Jumlah Koperasi yang bermitra							
		Sub Kegiatan 1 : Perluasan Akses								
		Sub Kegiatan 2 : Peningkatan	Jumlah Peserta yang mengikuti			396.500.000				
			Jumlah Koperasi yang							
			Jumlah Peserta yang							
			Jumlah Pembina dan PPKL yang			358.648.000				
			Jumlah Peserta yang							
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								
		Kegiatan 1 : Pemberdayaan Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang			2.132.718.624				
			Jumlah Konsultan PLUT yang							
			Jumlah UMKM yang bermitra							
		Sub Kegiatan 1 : Menumbuhkembangkan	Jumlah Wirausaha Pemula yang			54.780.2000				
			Jumlah Peserta yang mengikuti							
			Jumlah Database UMKM			813,741,624				
			Jumlah Peserta Forum Koordinasi							
			Jumlah UMKM yang							
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								
		Kegiatan 1 : Pengembangan Usaha	Jumlah UMKM yang meningkat			2.288.192.000				
			Jumlah Produk yang tersertifikasi							
			Jumlah UMKM yang							
		Sub Kegiatan 1 : Produksi dan	Jumlah UMKM yang mengikuti							
			Jumlah UMKM yang							
			Jumlah UMKM yang mengikuti			857.934.000				
			Jumlah UMKM yang							

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Pada tahun 2021 tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah “Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas” dengan 5 Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu:

1. Pengembangan pembangunan agropolitan;
2. Pengembangan pariwisata;
3. Peningkatan ekonomi masyarakat;
4. Pengembangan energi dan infrastruktur kewilayahan; dan
5. Pembangunan demokrasi.

Dari kelima prioritas pembangunan daerah ini, ada 3 prioritas pembangunan daerah yang berkaitan dengan pembinaan dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, yaitu pengembangan pembangunan agropolitan, pengembangan pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasikan sinergis baik dengan Kementerian/Lembaga Teknis Terkait, Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2021 secara efektif dan efisien. Selain itu Renja ini dijadikan sebagai salah satu bahan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD tahun 2021

Untuk mendukung realisasi 3 prioritas pembangunan daerah yang berkaitan dengan pembinaan dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah tersebut diatas pada tahun anggaran 2021, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memiliki 5 program prioritas yaitu:

1. Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
2. Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
3. Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil;
4. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
5. Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM.

Kelima program prioritas tersebut memiliki beberapa indikator dan target yang telah disepakati dan ditetapkan harus dilaksanakan sehingga dibutuhkan dukungan dari sisi penganggaran agar prioritas pembangunan daerah dapat tercapai.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam mengimplementasikan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, perlu memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2020;
2. Memperhatikan masalah yang dihadapi pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020;
3. Memperhatikan sumber daya yang dimiliki dan yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
4. Memperhatikan sasaran, tujuan dan target dari tiap indikator yang telah ditetapkan dan yang harus dicapai;
5. Memperhatikan keberlanjutan Program (*sustainable development*) yang terdapat pada Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah selama lima tahun, untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mengantisipasi tidak tercapainya target yang telah ditetapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan maka diperlukan Pengendalian dan evaluasi secara konsisten setiap triwulan tahun berjalan terhadap Rencana Kerja terkait kegiatan, target kinerja, anggaran dan permasalahan yang dihadapi untuk menentukan rencana tindak lanjut sebagai bahan perencanaan pelaksanaan kinerja program kegiatan pada tahun yang akan datang agar terlaksana sesuai target dan harapan.

Pangkalpinang, April 2020

Kepala Dinas
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Ir. Hj. ELFIYENA
Pembina Utama Madya
NIP. 19620915 199003 2 001

